

BAB V

KESIMPULAN

Iran yang merupakan salah satu negara di Timur-Tengah memiliki wilayah yang sangat strategis diapit oleh dua benua besar dan memiliki perbatasan yang begitu beragam. Hal ini membuat apa yang terjadi di dalam negeri Iran dapat mempengaruhi peta politik dunia. Sebagai salah satu contohnya adalah adanya perundingan Nuklir Iran yang terjadi antara negara-negara anggota P5 + 1 dengan Iran yang diawali oleh kecurigaan negara-negara Barat terhadap program pengembangan nuklir yang dimiliki oleh Iran. Adapun pada awalnya adalah pada saat 2003 IAEA membuat laporan tentang Iran setelah inspeksi ke fasilitas Natanz dan menemukan adanya potensi yang dapat membahayakan dunia. Mulai pada saat itu, Iran mendapatkan ujian-ujian dari luar negeri terhadap kepemilikan program nuklir tersebut.

Bahkan, Iran mendapatkan beberapa kali sanksi dari PBB dan juga dari Amerika Serikat yang sangat menekan Iran untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran tersebut. Yang pertama adalah melalui Resolusi 1696 tanggal 31 Juli 2006 (United Nation Security Council, 2006) yang berisikan tentang Iran yang harus meyakinkan kepada dunia bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktifitas yang berkaitan dengan program nuklir dan menghimbau kepada seluruh negara agar tidak membantu Iran. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2006 muncul resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (United Nation Security Council, 2006) yang masih berisi tentang himbauan penegasan atas Resolusi 1696 dan memberikan batas waktu 60 hari untuk

menjalankan resolusi ini. Oleh karena Iran tetap tidak mau melakukan apa yang DK PBB inginkan, DK PBB mengeluarkan Resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007 yang lebih berat kepada Iran yaitu pelarangan perdagangan senjata, permintaan agar negara memberlakukan larangan terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Kemudian muncul resolusi keempat nomor 1803 yang dikeluarkan oleh DK PBB pada tanggal 3 maret 2008 (United Nation Security Council, 2008) yang menuntut Iran untuk memenuhi tuntutan di resolusi terdahulu agar terciptanya kepercayaan dan membuktikan bahwa nuklir Iran didasari dengan tujuan damai.

Selama sanksi-sanksi tersebut dilancarkan, Iran tetap bersikeras dan menolak setiap tuduhan yang disangkalkan kepada Iran. Tentunya, adanya sanksi dapat membuat Iran mengalami perubahan ekonomi dan juga membuat perubahan kondisi politik dalam negeri mereka akibat adanya perbedaan pendapat mengenai program pengembangan nuklir Iran. Meskipun demikian, setelah terpilihnya presiden Rouhani pada tahun 2013, akhirnya Iran mulai melunak dan pada saat itulah perundingan nuklir Iran mulai intens dilakukan.

Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa fakta tentang alasan Iran ingin melakukan perundingan dengan negara-negara P5 + 1, adapun penemuan penulis tentang hal tersebut adalah:

1. Kondisi perpolitikan yang ada di dalam negeri Iran mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin lunturnya pengaruh kubu konservatif di lembaga eksekutif maupun parlemen sehingga para pembuat kebijakan yang berasal dari kaum reformis mampu untuk

melakukan perubahan yang berbeda seperti yang telah kaum konservatif tunjukkan.

2. Menurunnya kondisi ekonomi yang ada di Iran mampu mempengaruhi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan sesegera mungkin yang dianggap dapat memajukan perekonomian Iran.
3. Tekanan internasional yang begitu masif dilancarkan kepada Iran nyatanya mampu untuk menjadi faktor perubah keadaan para pembuat kebijakan di Iran.

Maka dari itu penulis melihat bahwa Iran telah menghadapi tekanan yang cukup kuat terkait program pengembangan teknologi nuklirnya sehingga Iran menjatuhkan pilihan untuk melunak terhadap negara-negara P5 + 1 demi menstabilkan kondisi ekonomi politik dalam negeri yang terpuruk akibat banyaknya sanksi yang diterima.